

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah memasuki era 4.0 dimana pada era digital ini, perkembangan teknologi berjalan dengan sangat pesat. Era ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mempermudah akses laporan keuangan. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut dapat dengan mudah dilihat pada website pemerintah di setiap daerah. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang kritis dengan ketertarikan informasi yang diakses. Berpikir kritis bertujuan untuk masyarakat merespon dalam memperoleh keinginan yang diterima. Kritis terhadap sesuatu memiliki dampak positif namun juga sebaliknya. Bukan hanya tugas dari legislatif tetapi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut turut berperan dalam melakukan pengawasan kinerja pemda (Alhadjjriana, Nor, dan Wijaya 2017).

Indonesia merupakan Negara yang menganut asas desentralisasi yang harus mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal sehingga terwujudnya *good governance* dan menciptakan sistem pengelolaan secara akuntabel dan transparan. Organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk menyediakan dan memproduksi barang-barang publik. Berbeda dengan organisasi swasta, sektor publik memiliki tujuan untuk melayani masyarakat. Organisasi sektor publik memiliki aktivitas

yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik (Nurillah, 2014). Otonomi daerah merupakan kewajiban, hak, dan wewenang daerah untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat secara sendiri sesuai yang diatur pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan konsep desentralisasi diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib mengembangkan dan mengelola potensi daerah. Dengan mendukung hal tersebut, pemerintah daerah harus menggunakan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabel merupakan suatu bentuk tanggung jawab dengan menyampaikan informasi penggunaan sumber daya berupa informasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah (Wau and Ratmono 2015). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur pada PP No. 71 Tahun 2010 dimana penyusunan dan pengembangan menggunakan suatu kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan memiliki ukuran normative yang dapat dipahami, dibandingkan, relevan, dan andal.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pada proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Penyelenggaran pemerintahan yang *good governance* dapat dengan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi melalui media. Media yang digunakan berupa internet dimana masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, terjangkau, dan cepat. Dengan kemudahan tersebut, internet merupakan solusi bagi pemerintah daerah dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan informasi mengenai kinerja keuangan dan non-keuangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemrerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Selain merupakan kewajiban bahwa pemerintah daerah harus mempublikasi laporan keuangan, terdapat juga faktor-faktor yang mengharuskan pemerintah mempublikasikan laporan kinerja pemerintah. Ukuran pemerintah daerah yang besar merupakan dorongan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja pemerintah ke publik. Ukuran pemerintah dapat diukur melalui besarnya aset pemerintah daerah. Semakin besar aset pemerintah daerah maka semakin besar daerah tersebut. Sehingga pemerintah daerah yang memiliki aset tinggi akan cenderung mempublikasi laporan keuangan dan masyarakat dapat mengaskses dengan mudah laporan keuangan pemda.

Selain itu, tingkat rasio pembiayaan utang atau *leverage* juga merupakan salah satu faktor pemerintah mempublikasikan laporan keuangan. Pemerintah daerah bertanggungjawab atas peminjaman utang kepada kreditur. Pemerintah daerah dengan utang yang tinggi wajib melakukan pertanggungjawaban kepada para kreditur. Semakin rendah utang pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut dapat mengelola daerah tersebut dengan baik.

Menurut Prasasti dkk, (2017) menyatakan bahwa opini audit mendorong pemerintah dalam pengungkapan laporan keuangan kepada publik. Sehingga masyarakat selaku steward dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pengungkapan informasi keuangan pada e-government yang terindikasi opini audit yang bagus akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat terhadap pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Alwahidi and Darwanis (2019) menyatakan bahwa Opini BPK tidak mampu mendorong pemerintah dalam mempublikasi laporan keuangan dikarenakan hasil opini yang baik tidak selalu mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki kinerja dan akuntabilitas yang tidak baik. Pemerintah daerah masih menganggap bahwa informasi keuangan bersifat rahasia. Faktor utama pemerintah tidak mempublikasikan informasi laporan keuangan yaitu tidak adanya sanksi bagi website yang tidak mempublikasikan laporan keuangan. Berdasarkan

hasil survey Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada September 2013 mengungkapkan bahwasanya masih banyak pemda yang masih enggan untuk mempublikasikan pengelolaan anggaran pada website resmi.

Apabila terdapat penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah maka mendorong pemerintah untuk menutupi informasi keuangan, sehingga tingkat publikasi laporan keuangan rendah (Handayani, 2010). Data dari KPK mencatat selama tahun 2002-2019 bahwa Pemerintah Pusat terdapat 359 kasus korupsi, Jawa Barat 101 kasus, Jawa Timur 85 kasus, DKI Jakarta 61 kasus, dan Banten 24 kasus (ayobandung.com). Dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia, pemerintah daerah cenderung enggan dalam mempublikasikan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wau and Ratmono (2015) dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen yaitu ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah sedangkan variabel independen yaitu kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetisi

politik, ukuran pemerintah daerah, dan kemandirian finansial tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR. Pada variabel keteraksesan, kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita dan opini tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Nosihana and Yaya (2016) menggunakan enam variabel independen adalah kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan utang (*leverage*), kekayaan pemda, tipe pemda, dan opini audit sedangkan variabel dependen yaitu IFR yang diukur dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 188.52/1797/SJ. Penelitian ini menggunakan 175 sampel pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2014. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetisi politik dan ukuran pemda berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui *e-government*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniawan and Scorpianti (2016) menggunakan 70 laporan keuangan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketersediaan dan keteraksesan pada *internet financial reporting*. Penelitian ini memiliki variabel dependen yang sama dengan penelitian Wau dan Ratmono (2015) dengan variabel independen leverage, opini audit, kemandirian keuangan pemerintah daerah. Pada variabel dependen ketersediaan menunjukkan leverage berpengaruh negatif sedangkan opini

audit dan kemandirian keuangan pemda berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.

Penelitian ini menambahkan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. Penggunaan variabel moderasi yakni kinerja keuangan berfungsi untuk memaksimalkan potensi daerah sehingga suatu daerah memiliki pendapatan daerah yang tinggi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah secara maksimal guna membangun daerah tersebut (Nufus dkk, 2019). Pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan daerah yang tinggi akan menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. Pemerintah daerah yang memperoleh kinerja yang baik akan memberikan sinyal yang positif kepada masyarakat dalam memaksimalkan potensi daerah ke website resmi (Wau dan Ratmono, 2015). Hasil dari kinerja pemerintah yang baik akan mendorong pemerintah dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan sehingga masyarakat dengan mudah mengakses laporan keuangan di website.

Dalam penelitian Wau dan Ratmono (2015) menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah yang tinggi mampu melakukan transparansi daerah pada website resmi pemda. Hal ini dapat akan berdampak baik terhadap ketertudahan masyarakat dalam mengakses laporan informasi keuangan melalui website pemerintah. Sehingga memberikan sinyal positif kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah. Kinerja keuangan

sebagai variabel moderasi digunakan untuk mendorong pemda dalam mengungkapkan informasi keuangan di website (Nufus dkk, 2019). Dimana pemerintah yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi akan memiliki potensi lebih besar untuk mengungkapkan hasil kinerja pemda ke website pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah, *leverage* dan opini bpk terhadap keteraksesan IFR dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. Obyek penelitian yakni pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Alasan menggunakan obyek provinsi tersebut adalah pemerintahan memiliki nilai sarana dan prasarana yang baik di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *LEVERAGE*, OPINI BPK TERHADAP KETERAKSESAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”

B. Rumusan Masalah Penelitian

- a. Apakah ukuran pemerintah daerah memengaruhi keteraksesan *internet financial reporting*?
- b. Apakah *leverage* memengaruhi keteraksesan *internet financial reporting*?
- c. Apakah opini bpk memengaruhi keteraksesan *internet financial reporting*?

- d. Apakah kinerja keuangan memengaruhi hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap keteraksesan *internet financial reporting*?
- e. Apakah kinerja keuangan memengaruhi hubungan antara *leverage* terhadap keteraksesan *internet financial reporting*?
- f. Apakah kinerja keuangan memengaruhi hubungan antara opini bpk terhadap keteraksesan *internet financial reporting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan penelitian untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris:

1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.
2. Pengaruh *leverage* terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.
3. Pengaruh opini bpk terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.
4. Kinerja keuangan memoderasi hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.
5. Kinerja keuangan memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.
6. Kinerja keuangan memoderasi hubungan antara opini bpk terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diharapkan pada penelitian yaitu secara teoritis dan praktik. Berikut uraian manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang akuntansi sektor publik serta dapat menjadi referensi pada penelitian berikutnya terkait keteraksesan *Internet Financial Reporting* (IFR). Penelitian ini juga diharapkan menambah kajian teori dalam keteraksesan *internet financial reporting*.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pelaporan kinerja berbasis internet.

b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Dapat dijadikan sebagai tambahan literatur terkhusus dalam bidang akuntansi sektor publik.

c. Manfaat bagi Peneliti

Peneliti dapat melatih kemampuan berfikir kritis serta menambah wawasan dalam pelaporan keuangan melalui internet.